



# **PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Pakpak Bharat telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/34/KPTS/TAHUN 2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tentang APBD Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Pakpak Bharat tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf "a" Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah . Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11,

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**  
**DAN**  
**BUPATI PAKPAK BHARAT**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.	268.888.339.030,00		
2. Belanja	Rp.	290.031.678.386,00		
(Defisit)			Rp.	(21.143.339.356,00)
3. Pembiayaan				
a. Penerimaan	Rp.	(22.993.339.356,00)		
b. Pengeluaran	Rp.	1.850.000.000,00		
Pembiayaan			Rp.	(21.143.339.356,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.			(0,00)

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 5.044.710.613,00
  - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 248.125.777.941,00
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 15.717.850.476,00
  
- (2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "a" terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 675.854.113,00
  - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp.1.483.856.500,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 670.000.000,00
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. 2.215.000.000,00
  
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "b" terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 20.879.661.941,00
  - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 198.404.616.000,00
  - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 28.841.500.000,00
  
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "c" terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Hibah sejumlah Rp. 0,00
  - b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00
  - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya sejumlah Rp.3.270.154.876,00
  - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 8.166.735.600,00
  - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp.4.280.960.000,00

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 141.081.028.898,00
  - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 148.950.649.488,00
  
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "a" terdiri dari jenis belanja :
  - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 118.415.974.898,00
  - b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,00
  - c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,00
  - d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 4.574.850.000,00
  - e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 13.950.204.000,00
  - f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 0,00
  - g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 3.140.000.000,00
  - h. Belanja Tidak terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
  
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "b" terdiri dari jenis belanja:
  - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.6.749.576.264,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 76.404.471.809,00
  - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 65.796.601.415,00



## Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 25 Januari 2011

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**



*Remigo Yolando Berutu*  
**REMIGO YOLANDO BERUTU**

Diundangkan di Salak  
pada tanggal 25 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH PAKPAK BHARAT,**

*Gandi Wartha Manik*

**GANDI WARTHA MANIK**



#### **Pasal 4**

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Penerimaan sejumlah Rp. 22.993.339.356,00
  - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 1.850.000.000,00
  
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "a" terdiri dari jenis pembiayaan:
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 22.993.339.356,00
  - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
  - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
  - d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00
  - f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 000
  
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "b" terdiri dari jenis pembiayaan:
  - a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
  - b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 1.850.000.000,00
  - c. Pembayaran Pokok utang sejumlah Rp. 0,00
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00

#### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD Menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD Menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Dan Pengurangan Aset lain-lain;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran yang Belurn diselesaikan dan dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah.

## **Pasal 6**

Sebagaimana landasan operasional, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Lampiran I Peraturan Daerah

Nomor : 1 Tahun 2011

Tanggal : 25 Januari 2011



**PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**  
**RINGKASAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2011

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	<b>PENDAPATAN</b>	
		268.888.339.030,00
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	
		5.044.710.613,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	675.854.113,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.483.856.500,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	670.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.215.000.000,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	248.125.777.941,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20.879.661.941,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	198.404.616.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	28.841.500.000,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	15.717.850.476,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	3.270.154.876,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	8.166.735.600,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4.280.960.000,00
2	<b>BELANJA</b>	290.031.678.386,00
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	141.081.028.898,00
2.1.1	Belanja Pegawai	118.415.974.898,00
2.1.4	Belanja Hibah	4.574.850.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	13.950.204.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	3.140.000.000,00
2.1.9	Belanja Tidak Langsung Lainnya	

2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	148.950.649.488,00
2.2.1	Belanja Pegawai	6.749.576.264,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.404.471.809,00
2.2.3	Belanja Modal	65.796.601.415,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(21.143.339.356,00)
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	22.993.339.356,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	22.993.339.356,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	1.850.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.850.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	21.143.339.356,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00

SALAK, 25 Januari 2011

**BUPATI**



**REMIGO YOLANDO BERUTU**

## KABUPATEN PAKPAK BHARAT

## RANCANGAN ANGGARAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2011

	PENDAPATAN	BELANJA		
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	3	4	5	6
	268.612.961.030,00	130.320.934.744,00	127.244.564.745,00	257.565.499.489,00
	99.600.000,00	51.742.970.341,00	20.806.981.699,00	72.549.952.040,00
	99.600.000,00	51.742.970.341,00	20.806.981.699,00	72.549.952.040,00
	118.150.000,00	14.745.757.280,00	11.504.299.403,00	26.250.056.683,00
	47.000.000,00	10.352.938.956,00	7.288.104.533,00	17.641.043.489,00
	71.150.000,00	4.392.818.324,00	4.216.194.870,00	8.609.013.194,00
	590.000.000,00	3.061.673.823,00	31.406.228.297,00	34.467.902.120,00
	590.000.000,00	3.061.673.823,00	31.406.228.297,00	34.467.902.120,00
	500.000,00	2.150.687.198,00	3.429.394.600,00	5.580.081.798,00
	500.000,00	2.150.687.198,00	3.429.394.600,00	5.580.081.798,00
	0,00	0,00	281.536.231,00	281.536.231,00
HAN	0,00	0,00	281.536.231,00	281.536.231,00
	0,00	0,00	1.155.379.840,00	1.155.379.840,00
HAN	0,00	0,00	158.302.440,00	158.302.440,00
	0,00	0,00	997.077.400,00	997.077.400,00
	0,00	0,00	2.465.543.275,00	2.465.543.275,00
	0,00	0,00	2.465.543.275,00	2.465.543.275,00
	95.000.000,00	1.343.772.246,00	1.278.758.175,00	2.622.530.421,00
	95.000.000,00	1.343.772.246,00	1.278.758.175,00	2.622.530.421,00
	0,00	0,00	137.358.100,00	137.358.100,00
KB	0,00	0,00	137.358.100,00	137.358.100,00
	0,00	0,00	1.040.896.300,00	1.040.896.300,00
KB	0,00	0,00	1.040.896.300,00	1.040.896.300,00
	0,00	1.687.870.235,00	1.355.317.090,00	3.043.187.325,00
	0,00	1.687.870.235,00	1.326.291.590,00	3.014.161.825,00
	0,00	0,00	29.025.500,00	29.025.500,00



PEMERINTAH  
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	2
1	<b>Urusan Wajib</b>
1.01	<b>Pendidikan</b>
1.01 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN
1.02	<b>Kesehatan</b>
1.02 . 1.02.01	DINAS KESEHATAN
1.02 . 1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK
1.03	<b>Pekerjaan Umum</b>
1.03 . 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.06	<b>Perencanaan Pembangunan</b>
1.06 . 1.06.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.07	<b>Perhubungan</b>
1.07 . 1.17.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN
1.08	<b>Lingkungan Hidup</b>
1.08 . 1.17.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN
1.08 . 2.02.01	DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN
1.09	<b>Pertanian</b>
1.09 . 1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH
1.10	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>
1.10 . 1.10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.11	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>
1.11 . 1.22.01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN ANAK
1.12	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>
1.12 . 1.22.01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN ANAK
1.13	<b>Sosial</b>
1.13 . 1.13.01	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.13 . 1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	2
1.14	<b>Ketenagakerjaan</b>
1.14 . 1.13.01	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.15	<b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>
1.15 . 2.07.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN
1.16	<b>Penanaman Modal</b>
1.16 . 1.16.01	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL
1.17	<b>Kebudayaan</b>
1.17 . 1.17.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN
1.18	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>
1.18 . 1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH
1.19	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>
1.19 . 1.19.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.19 . 1.19.02	SATUAN POLISI PAMONG RAJA
1.19 . 1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH
1.20	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Peradilan Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>
1.20 . 1.20.01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1.20 . 1.20.02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
1.20 . 1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH
1.20 . 1.20.04	SEKRETARIAT DPRD
1.20 . 1.20.05	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20 . 1.20.07	INSPEKTORAT KABUPATEN
1.20 . 1.20.08	KANTOR KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20 . 1.20.09	KECAMATAN SALAK
1.20 . 1.20.10	KECAMATAN KERAJAAN
1.20 . 1.20.11	KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE
1.20 . 1.20.12	KECAMATAN PARGETTENG-GETTENG SENGKUT
1.20 . 1.20.13	KECAMATAN PAGINDAR
1.20 . 1.20.14	KECAMATAN SIEMPAT RUBE
1.20 . 1.20.15	KECAMATAN TINADA
1.20 . 1.20.16	KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU
1.22	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>
1.22 . 1.20.09	KECAMATAN SALAK
1.22 . 1.20.10	KECAMATAN KERAJAAN
1.22 . 1.20.11	KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE
1.22 . 1.20.12	KECAMATAN PARGETTENG-GETTENG SENGKUT

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

	PENDAPATAN	BELANJA		
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	3	4	5	6
	0,00	0,00	47.834.600,00	47.834.600,00
	0,00	0,00	47.834.600,00	47.834.600,00
	0,00	0,00	1.454.651.250,00	1.454.651.250,00
MENENGAH	0,00	0,00	1.454.651.250,00	1.454.651.250,00
	58.462.500,00	872.077.907,00	702.561.700,00	1.574.639.607,00
	58.462.500,00	872.077.907,00	702.561.700,00	1.574.639.607,00
	56.336.000,00	1.760.770.133,00	2.697.702.710,00	4.458.472.843,00
V	56.336.000,00	1.760.770.133,00	2.697.702.710,00	4.458.472.843,00
	0,00	0,00	364.227.900,00	364.227.900,00
	0,00	0,00	364.227.900,00	364.227.900,00
	0,00	2.130.719.096,00	2.059.837.624,00	4.190.556.720,00
	0,00	966.021.458,00	622.634.564,00	1.588.656.022,00
	0,00	1.164.697.638,00	1.062.508.000,00	2.227.205.638,00
	0,00	0,00	374.695.060,00	374.695.060,00
ngkat	267.594.912.530,00	49.074.425.327,00	38.831.466.351,00	87.905.891.678,00
	0,00	2.496.859.144,00	0,00	2.496.859.144,00
	0,00	287.467.506,00	0,00	287.467.506,00
	348.230.000,00	7.016.057.106,00	23.433.696.332,00	30.449.753.438,00
	0,00	1.742.199.494,00	4.506.080.050,00	6.248.279.544,00
	267.246.682.530,00	25.295.617.162,00	3.248.870.039,00	28.544.487.201,00
	0,00	1.798.500.657,00	1.266.021.100,00	3.064.521.757,00
	0,00	1.628.932.579,00	2.583.169.500,00	4.212.102.079,00
	0,00	1.296.873.536,00	527.090.175,00	1.823.963.711,00
	0,00	1.366.832.690,00	505.535.875,00	1.872.368.565,00
	0,00	1.128.074.322,00	447.930.175,00	1.576.004.497,00
	0,00	1.099.541.758,00	468.060.200,00	1.567.601.958,00
	0,00	919.835.694,00	542.968.475,00	1.462.804.169,00
	0,00	912.014.665,00	510.798.400,00	1.422.813.065,00
	0,00	1.111.695.930,00	369.184.230,00	1.480.880.160,00
	0,00	973.923.084,00	422.061.800,00	1.395.984.884,00
	0,00	1.750.211.158,00	4.933.767.500,00	6.683.978.658,00
	0,00	0,00	27.368.800,00	27.368.800,00
	0,00	0,00	35.931.100,00	35.931.100,00
	0,00	0,00	24.634.300,00	24.634.300,00
	0,00	0,00	7.627.400,00	7.627.400,00

	PENDAPATAN	BELANJA		
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	3	4	5	6
	0,00	0,00	32.162.900,00	32.162.900,00
	0,00	0,00	26.039.300,00	26.039.300,00
	0,00	0,00	18.724.600,00	18.724.600,00
KB	0,00	1.750.211.158,00	4.761.279.100,00	6.511.490.258,00
	0,00	0,00	89.533.100,00	89.533.100,00
	0,00	0,00	89.533.100,00	89.533.100,00
	0,00	0,00	1.201.289.000,00	1.201.289.000,00
	0,00	0,00	1.201.289.000,00	1.201.289.000,00
	275.378.000,00	10.760.094.154,00	21.706.084.743,00	32.466.178.897,00
	192.218.000,00	6.037.125.649,00	12.624.854.553,00	18.661.980.202,00
	192.218.000,00	2.720.650.900,00	9.639.129.153,00	12.359.780.053,00
	0,00	3.316.474.749,00	2.985.725.400,00	6.302.200.149,00
	7.800.000,00	2.398.803.688,00	1.894.054.800,00	4.292.858.488,00
	7.800.000,00	2.398.803.688,00	1.894.054.800,00	4.292.858.488,00
	0,00	0,00	2.215.138.200,00	2.215.138.200,00
	0,00	0,00	2.215.138.200,00	2.215.138.200,00
THAN	0,00	0,00	220.679.190,00	220.679.190,00
	0,00	0,00	220.679.190,00	220.679.190,00
	0,00	0,00	1.560.533.700,00	1.560.533.700,00
	0,00	0,00	1.560.533.700,00	1.560.533.700,00
DAN MENENGAH	0,00	0,00	1.643.456.300,00	1.643.456.300,00
	0,00	0,00	1.643.456.300,00	1.643.456.300,00
	75.360.000,00	2.324.164.817,00	1.381.765.700,00	3.705.930.517,00
DAN MENENGAH	75.360.000,00	2.324.164.817,00	1.381.765.700,00	3.705.930.517,00
	0,00	0,00	165.602.300,00	165.602.300,00
	0,00	0,00	165.602.300,00	165.602.300,00
	268.888.339.030,00	141.081.028.898,00	148.950.649.488,00	290.031.678.386,00
			(21.143.339.356,00)	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	2
1.22 . 1.20.14	KECAMATAN SIEMPAT RUBE
1.22 . 1.20.15	KECAMATAN TINADA
1.22 . 1.20.16	KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU
1.22 . 1.22.01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN
1.24	<b>Kearsipan</b>
1.24 . 1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH
1.25	<b>Komunikasi dan Informatika</b>
1.25 . 1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH
2	<b>Urusan Pilihan</b>
2.01	<b>Pertanian</b>
2.01 . 2.01.01	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
2.01 . 2.01.02	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2.02	<b>Kehutanan</b>
2.02 . 2.02.01	DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN
2.03	<b>Energi dan Sumberdaya Mineral</b>
2.03 . 2.02.01	DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN
2.04	<b>Pariwisata</b>
2.04 . 1.17.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN KEBERSI
2.05	<b>Kelautan dan Perikanan</b>
2.05 . 2.01.01	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
2.06	<b>Perdagangan</b>
2.06 . 2.07.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL I
2.07	<b>Industri</b>
2.07 . 2.07.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL I
2.08	<b>Ketransmigrasian</b>
2.08 . 1.13.01	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
<b>JUMLAH</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	2
1 1.20 1.20 . 1.20.05	<b>Urusan Wajib</b> <b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Peran Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b> DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN

	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
	PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
	3	4	5	6
	22.993.339.356,00	1.850.000.000,00	21.143.339.356,00	
ngkat	22.993.339.356,00	1.850.000.000,00	21.143.339.356,00	
	22.993.339.356,00	1.850.000.000,00	21.143.339.356,00	
<b>UN ANGGARAN BERKENAAN</b>				0,00

SALAK, 25 Januari 2011

BUPATI



*Remigo Yolando Berutu*

REMIGO YOLANDO BERUTU

**KABUPATEN PAKPAK BHARAT**  
**ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN**

TAHUN ANGGARAN 2011

	PENDAPATAN	BELANJA		
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	3	4	5	6
	99.600.000,00	51.742.970.341,00	20.806.981.699,00	72.549.952.040,00
	99.600.000,00	51.742.970.341,00	20.806.981.699,00	72.549.952.040,00
	47.000.000,00	10.352.938.956,00	7.288.104.533,00	17.641.043.489,00
	47.000.000,00	10.352.938.956,00	7.288.104.533,00	17.641.043.489,00
	71.150.000,00	4.392.818.324,00	4.216.194.870,00	8.609.013.194,00
	71.150.000,00	4.392.818.324,00	4.216.194.870,00	8.609.013.194,00
	590.000.000,00	3.061.673.823,00	31.406.228.297,00	34.467.902.120,00
	590.000.000,00	3.061.673.823,00	31.406.228.297,00	34.467.902.120,00
	500.000,00	2.150.687.198,00	3.429.394.600,00	5.580.081.798,00
	500.000,00	2.150.687.198,00	3.429.394.600,00	5.580.081.798,00
	95.000.000,00	1.343.772.246,00	1.278.758.175,00	2.622.530.421,00
	95.000.000,00	1.343.772.246,00	1.278.758.175,00	2.622.530.421,00
	0,00	1.687.870.235,00	1.539.728.490,00	3.227.598.725,00
	0,00	1.687.870.235,00	1.326.291.590,00	3.014.161.825,00
	0,00	0,00	47.834.600,00	47.834.600,00
	0,00	0,00	165.602.300,00	165.602.300,00
	58.462.500,00	872.077.907,00	702.561.700,00	1.574.639.607,00
	58.462.500,00	872.077.907,00	702.561.700,00	1.574.639.607,00
BERSIHAN	56.336.000,00	1.760.770.133,00	3.358.220.571,00	5.118.990.704,00
	0,00	0,00	281.536.231,00	281.536.231,00
	0,00	0,00	158.302.440,00	158.302.440,00
	56.336.000,00	1.760.770.133,00	2.697.702.710,00	4.458.472.843,00
	0,00	0,00	220.679.190,00	220.679.190,00
	0,00	966.021.458,00	622.634.564,00	1.588.656.022,00



PEMERINTAH  
RINGKASAN APBD MENURUT

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1	2
1.01.01	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>
1.01	Urusan Wajib Pendidikan
1.02.01	<b>DINAS KESEHATAN</b>
1.02	Urusan Wajib Kesehatan
1.02.02	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK</b>
1.02	Urusan Wajib Kesehatan
1.03.01	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM</b>
1.03	Urusan Wajib Pekerjaan Umum
1.06.01	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
1.06	Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
1.10.01	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>
1.10	Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
1.13.01	<b>DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>
1.13	Urusan Wajib Sosial
1.14	Urusan Wajib Ketenagakerjaan
2.08	Urusan Pilihan Ket transmigrasian
1.16.01	<b>KANTOR PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL</b>
1.16	Urusan Wajib Penanaman Modal
1.17.01	<b>DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN KEBUDAYAAN</b>
1.07	Urusan Wajib Perhubungan
1.08	Urusan Wajib Lingkungan Hidup
1.17	Urusan Wajib Kebudayaan
2.04	Urusan Pilihan Pariwisata
1.19.01	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH



KODE		SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1		2
	1.19	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.19.02		<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>
	1.19	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.20.01		<b>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>
	1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Per
1.20.02		<b>KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH</b>
	1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Per
1.20.03		<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>
	1.09	Urusan Wajib Pertanahan
	1.13	Urusan Wajib Sosial
	1.18	Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga
	1.19	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Per
	1.24	Urusan Wajib Kearsipan
	1.25	Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
1.20.04		<b>SEKRETARIAT DPRD</b>
	1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Per
1.20.05		<b>DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>
	1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Per
1.20.07		<b>INSPEKTORAT KABUPATEN</b>
	1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Per
1.20.08		<b>KANTOR KEPEGAWAIAN DAERAH</b>
	1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Per
1.20.09		<b>KECAMATAN SALAK</b>
	1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Per
	1.22	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.20.10		<b>KECAMATAN KERAJAAN</b>
	1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Per
	1.22	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.20.11		<b>KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE</b>
	1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Per

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

	PENDAPATAN	BELANJA		
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	3	4	5	6
	0,00	966.021.458,00	622.634.564,00	1.588.656.022,00
	0,00	1.164.697.638,00	1.062.508.000,00	2.227.205.638,00
	0,00	1.164.697.638,00	1.062.508.000,00	2.227.205.638,00
	0,00	2.496.859.144,00	0,00	2.496.859.144,00
angkat	0,00	2.496.859.144,00	0,00	2.496.859.144,00
	0,00	287.467.506,00	0,00	287.467.506,00
angkat	0,00	287.467.506,00	0,00	287.467.506,00
	348.230.000,00	7.016.057.106,00	27.958.010.167,00	34.974.067.273,00
	0,00	0,00	2.465.543.275,00	2.465.543.275,00
	0,00	0,00	29.025.500,00	29.025.500,00
	0,00	0,00	364.227.900,00	364.227.900,00
	0,00	0,00	374.695.060,00	374.695.060,00
angkat	348.230.000,00	7.016.057.106,00	23.433.096.332,00	30.449.753.438,00
	0,00	0,00	89.533.100,00	89.533.100,00
	0,00	0,00	1.201.289.000,00	1.201.289.000,00
	0,00	1.742.199.494,00	4.506.080.050,00	6.248.279.544,00
angkat	0,00	1.742.199.494,00	4.506.080.050,00	6.248.279.544,00
	267.246.682.530,00	25.295.617.162,00	3.248.870.039,00	28.544.487.201,00
angkat	267.246.682.530,00	25.295.617.162,00	3.248.870.039,00	28.544.487.201,00
	0,00	1.798.500.657,00	1.266.021.100,00	3.064.521.757,00
angkat	0,00	1.798.500.657,00	1.266.021.100,00	3.064.521.757,00
	0,00	1.628.932.579,00	2.583.169.500,00	4.212.102.079,00
angkat	0,00	1.628.932.579,00	2.583.169.500,00	4.212.102.079,00
	0,00	1.296.873.536,00	554.458.975,00	1.851.332.511,00
angkat	0,00	1.296.873.536,00	527.090.175,00	1.823.963.711,00
	0,00	0,00	27.368.800,00	27.368.800,00
	0,00	1.366.832.690,00	541.466.975,00	1.908.299.665,00
angkat	0,00	1.366.832.690,00	505.535.875,00	1.872.368.565,00
	0,00	0,00	35.931.100,00	35.931.100,00
	0,00	1.128.074.322,00	472.564.475,00	1.600.638.797,00
angkat	0,00	1.128.074.322,00	447.930.175,00	1.576.004.497,00

	PENDAPATAN	BELANJA		
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	3	4	5	6
	0,00	0,00	24.634.300,00	24.634.300,00
	0,00	1.099.541.758,00	475.687.600,00	1.575.229.358,00
Perangkat	0,00	1.099.541.758,00	468.060.200,00	1.567.601.958,00
	0,00	0,00	7.627.400,00	7.627.400,00
Perangkat	0,00	919.835.694,00	542.968.475,00	1.462.804.169,00
	0,00	919.835.694,00	542.968.475,00	1.462.804.169,00
Perangkat	0,00	912.014.665,00	542.961.300,00	1.454.975.965,00
	0,00	912.014.665,00	510.798.400,00	1.422.813.065,00
	0,00	0,00	32.162.900,00	32.162.900,00
Perangkat	0,00	1.111.695.930,00	395.223.530,00	1.506.919.460,00
	0,00	1.111.695.930,00	369.184.230,00	1.480.880.160,00
	0,00	0,00	26.039.300,00	26.039.300,00
Perangkat	0,00	973.923.084,00	440.786.400,00	1.414.709.484,00
	0,00	973.923.084,00	422.061.800,00	1.395.984.884,00
	0,00	0,00	18.724.600,00	18.724.600,00
DAN KB	0,00	1.750.211.158,00	5.939.533.500,00	7.689.744.658,00
	0,00	0,00	137.358.100,00	137.358.100,00
	0,00	0,00	1.040.896.300,00	1.040.896.300,00
	0,00	1.750.211.158,00	4.761.279.100,00	6.511.490.258,00
	192.218.000,00	2.720.650.900,00	11.199.662.853,00	13.920.313.753,00
	192.218.000,00	2.720.650.900,00	9.639.129.153,00	12.359.780.053,00
	0,00	0,00	1.560.533.700,00	1.560.533.700,00
	0,00	3.316.474.749,00	2.985.725.400,00	6.302.200.149,00
	0,00	3.316.474.749,00	2.985.725.400,00	6.302.200.149,00
	7.800.000,00	2.398.803.688,00	5.106.270.400,00	7.505.074.088,00
	0,00	0,00	997.077.400,00	997.077.400,00
	7.800.000,00	2.398.803.688,00	1.894.054.800,00	4.292.858.488,00
	0,00	0,00	2.215.138.200,00	2.215.138.200,00
CIL DAN	75.360.000,00	2.324.164.817,00	4.479.873.250,00	6.804.038.067,00
	0,00	0,00	1.454.651.250,00	1.454.651.250,00
	0,00	0,00	1.643.456.300,00	1.643.456.300,00

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1	2
1.20.12	1.22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa <b>KECAMATAN PARGETTENG-GETTENG SENGKUT</b>
	1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, F
	1.22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.20.13	<b>KECAMATAN PAGINDAR</b>
	1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, F
1.20.14	<b>KECAMATAN SIEMPAT RUBE</b>
	1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, F
	1.22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.20.15	<b>KECAMATAN TINADA</b>
	1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, F
	1.22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.20.16	<b>KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU</b>
	1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, F
	1.22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.22.01	<b>BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN I</b>
	1.11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.12 Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
	1.22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.01.01	<b>DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN</b>
	2.01 Urusan Pilihan Pertanian
	2.05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
2.01.02	<b>BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN</b>
	2.01 Urusan Pilihan Pertanian
2.02.01	<b>DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN</b>
	1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
	2.02 Urusan Pilihan Kehutanan
	2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
2.07.01	<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KE MENENGAH</b>
	1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.06 Urusan Pilihan Perdagangan

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KODE		SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1		2
2.07		Urusan Pilihan Industri
<b>JUMLAH</b>		
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		
KODE		SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1		2
1.20.05		<b>DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>
	1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Per

**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN**

	PENDAPATAN	BELANJA		
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	3	4	5	6
	75.360.000,00	2.324.164.817,00	1.381.765.700,00	3.705.930.517,00
	268.888.339.030,00	141.081.028.898,00	148.950.649.488,00	290.031.678.386,00
	(21.143.339.356,00)			
	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
	PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
	3	4	5	6
	22.993.339.356,00	1.850.000.000,00	21.143.339.356,00	
angkat	22.993.339.356,00	1.850.000.000,00	21.143.339.356,00	
<b>JUN ANGGARAN BERKENAAN</b>				0,00

SALAK, 25 Januari 2011

**BUPATI**



*Remigo Yolando Berutu*

**REMIGO YOLANDO BERUTU**

**KABUPATEN PAKPAK BHARAT**  
**USAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,**  
**Y, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
 TAHUN ANGGARAN 2011

	JUMLAH	DASAR HUKUM	
	3	4	
	99.600.000,00	Perda No. 16 Tahun 2006	
	99.600.000,00		
	99.600.000,00		
	72.549.952.040,00		
	51.742.970.341,00		
	51.742.970.341,00		PMK 223/PMK. 07/2009
	20.806.981.699,00		
	2.652.880.476,00		
	31.635.000,00		
	31.635.000,00		
	88.560.000,00		
	88.560.000,00		
	126.472.940,00		
	126.472.940,00		
	84.828.400,00		
	84.828.400,00		
	711.115.055,00		
	711.115.055,00		
	173.568.600,00		
	173.568.600,00		
gunan kantor	51.350.081,00		
	51.350.081,00		
ndangan	77.760.000,00		



PEMERINTAH  
RINCIAN APBD MENURUT UR  
PENDAPATAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 01                      Urusan Wajib Pendidikan  
Organisasi : 1 . 01 . 01                      DINAS PENDIDIKAN  
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01                      DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>
1.01 . 1.01.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan ban</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-u</i>

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN



KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22	<i>Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis per</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26	<i>Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26	<i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06	<i>Pelatihan SDM</i>
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 15	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58	<i>Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini</i>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01	<i>Pembangunan gedung sekolah</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	77.760.000,00	
	626.847.500,00	
	626.847.500,00	
kantoran	198.628.000,00	
	67.828.000,00	
	130.800.000,00	
	453.330.000,00	
	453.330.000,00	
	28.784.900,00	
	28.784.900,00	
	373.730.900,00	
	26.998.100,00	
	1.737.500,00	
	25.260.600,00	
	34.151.300,00	
	1.250.000,00	
	32.901.300,00	
	283.250.000,00	
	283.250.000,00	
	13.731.500,00	
	13.731.500,00	
	15.600.000,00	
	15.600.000,00	
ur	40.000.000,00	
	40.000.000,00	
	40.000.000,00	
	903.989.000,00	
	903.989.000,00	
	1.325.000,00	
	902.664.000,00	
hun	15.270.675.400,00	
	515.483.000,00	
	40.130.000,00	

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	4.953.000,00	
	470.400.000,00	
	28.079.000,00	
	5.600.000,00	
	22.479.000,00	
	19.169.250,00	
	4.200.000,00	
	14.969.250,00	
	90.473.250,00	
	1.694.000,00	
	88.779.250,00	
	61.435.300,00	
	31.810.000,00	
	29.625.300,00	
	28.057.200,00	
	3.500.000,00	
	24.557.200,00	
aan (UNPK) Paket A, B dan C	32.534.800,00	
	4.365.000,00	
	28.169.800,00	
kan	10.393.090.600,00	
	7.550.000,00	
	233.200.600,00	
	10.152.340.000,00	
	4.102.353.000,00	
	4.102.353.000,00	
	1.003.296.773,00	
	14.000.000,00	
	14.000.000,00	
	505.000.000,00	
	3.650.000,00	
	1.350.000,00	
	500.000.000,00	
	4.376.083,00	

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87	<i>Sosialisasi ujian sekolah (UASBN) SD/MI</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88	<i>Pelaksanaan UASBN SD/MI</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92	<i>Pelaksanaan ujian SMP/MTs</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95	<i>Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97	<i>Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100	<i>Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101	<i>Penggunaan dana BOS SD/SDLB dan SMP Negeri</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17	<b>Program Pendidikan Menengah</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 14	<i>Pembangunan sarana air bersih dan sanitary</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18	<i>Pengadaan alat praktik dan peraga siswa</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20	<i>Pengadaan perlengkapan sekolah</i>

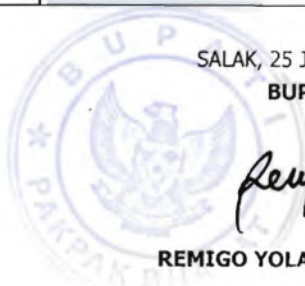
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 23	<i>Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66	<i>Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indut</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82	<i>Olimpiade Sains Tk. SMA</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 86	<i>Ujian Akhir Sekolah Tk. SMA</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 86 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 86 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87	<i>Ujian Akhir Sekolah Tk. SMK</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 90	<i>Fasilitasi ujian nasional</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91	<i>Kerjasama, monitoring dan evaluasi mahasiswa yang masu</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 95	<i>Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan modul pembela,</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 95 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 95 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96	<i>Pengadaan buku adat dan budaya Pakpak SMP dan SMA</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 17 . 96 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 18	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14	<i>Kegiatan HAI</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15	<i>Peringatan Hari Pendidikan Nasional</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	4.376.083,00	
	52.228.790,00	
	52.228.790,00	
<i>i</i>	80.585.000,00	
	2.700.000,00	
	77.885.000,00	
	31.202.400,00	
	1.400.000,00	
	29.802.400,00	
	29.974.400,00	
	14.850.000,00	
	15.124.400,00	
	15.460.200,00	
	7.270.000,00	
	8.190.200,00	
	117.667.000,00	
	1.400.000,00	
	116.267.000,00	
<i>k ke PTN</i>	17.812.900,00	
	1.400.000,00	
	16.412.900,00	
<i>ajaran pendidikan SMK (KTSP)</i>	9.990.000,00	
	7.260.000,00	
	2.730.000,00	
	125.000.000,00	
	1.700.000,00	
	3.300.000,00	
	120.000.000,00	
	387.163.850,00	
	54.321.550,00	
	1.325.000,00	
	52.996.550,00	
	42.990.400,00	
	1.925.000,00	

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	41.065.400,00	
	39.976.900,00	
	2.525.000,00	
	37.451.900,00	
	130.045.000,00	
	67.200.000,00	
	3.717.000,00	
	59.128.000,00	
	36.350.000,00	
	12.605.000,00	
	23.745.000,00	
	47.290.500,00	
	12.465.000,00	
	34.825.500,00	
	36.189.500,00	
	3.200.000,00	
	2.261.400,00	
	30.728.100,00	
kan	175.245.300,00	
	42.973.400,00	
	10.025.000,00	
	32.948.400,00	
oak Tk. SD/MI	132.271.900,00	
	54.125.000,00	
	78.146.900,00	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(72.450.352.040,00)</b>	



SALAK, 25 Januari 2011

**BUPATI**

*Remigo Yolando Berutu*

**REMIGO YOLANDO BERUTU**

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16	<i>Jambore PTK PNF</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21	<i>Penyelenggaraan taman bacaan masyarakat</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22	<i>Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PNF kesetaraan</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23	<i>Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PNF PAUD</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 27	<i>Pembangunan sarana listrik</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 20	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22	<i>Sosialisasi Sertifikasi Pendidik</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 20 . 35	<i>Pelatihan guru mata pelajaran muatan lokal dan adat budaya pak</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa



**KABUPATEN PAKPAK BHARAT**  
**PERATURAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,**  
**STRUKTUR, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2011**

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	47.000.000,00	Perda No. 15 Tahun 2007
	47.000.000,00	
	47.000.000,00	
	17.641.043.489,00	
	10.352.938.956,00	
	10.352.938.956,00	
	7.288.104.533,00	
	1.438.887.200,00	
	43.431.100,00	
	43.431.100,00	
	391.600.000,00	
	231.600.000,00	
	160.000.000,00	
	26.000.000,00	
	26.000.000,00	
	77.735.000,00	
	77.735.000,00	
	144.186.100,00	
	1.350.000,00	
	275.800,00	
	112.560.300,00	
	184.010.000,00	
	184.010.000,00	
Perkantoran	74.400.000,00	



PEMERINTAH  
RINCIAN APBD MENURUT UR  
PENDAPATAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 02                      Urusan Wajib Kesehatan  
Organisasi : 1 . 02 . 01                      DINAS KESEHATAN  
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01                      DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>
1.02 . 1.02.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22	<i>Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis p</i>

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26	<i>Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah</i>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>
1.02 . 1.02.01 . 03 . 05	<i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i>
1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 03 . 08	<i>Evaluasi jabatan fungsional</i>
1.02 . 1.02.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 15	<b>Program: Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01	<i>Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02	<i>Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07	<i>Pengadaan Obat-obatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03	<i>Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasa jaringannya</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12	<i>Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	74.400.000,00	
	497.525.000,00	
	497.525.000,00	
	817.020.000,00	
	156.500.000,00	
	156.500.000,00	
	660.520.000,00	
	660.520.000,00	
	49.091.800,00	
	35.000.000,00	
	35.000.000,00	
	14.091.800,00	
	14.091.800,00	
	185.000.000,00	
	185.000.000,00	
	185.000.000,00	
	932.330.100,00	
	111.604.600,00	
	1.350.000,00	
	110.254.600,00	
	46.159.300,00	
	850.000,00	
	45.309.300,00	
	774.566.200,00	
	1.350.000,00	
	773.216.200,00	
	1.952.597.200,00	
	1.552.756.300,00	
	5.550.000,00	
	124.466.300,00	
	1.422.740.000,00	
	342.823.000,00	
	229.823.000,00	

rana puskesmas dan

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	113.000.000,00	
	23.040.000,00	
	23.040.000,00	
	33.977.900,00	
	8.275.000,00	
	25.702.900,00	
syarakat	261.135.900,00	
	243.484.500,00	
	3.600.000,00	
	239.884.500,00	
	17.651.400,00	
	8.800.000,00	
	8.851.400,00	
	53.318.300,00	
	22.681.100,00	
	22.681.100,00	
	20.441.800,00	
	7.000.000,00	
	13.441.800,00	
	10.195.400,00	
	10.195.400,00	
t Menular	524.998.883,00	
	13.892.800,00	
	13.642.800,00	
	250.000,00	
	49.809.833,00	
	49.809.833,00	
	48.764.600,00	
	48.764.600,00	
	104.394.900,00	
	104.394.900,00	
an wabah	20.434.200,00	
	20.434.200,00	
	66.553.400,00	

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15	<i>Penyediaan jasa pelayanan kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16	<i>Peringatan hasi kesehatan nasional (HKN)</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 19	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02	<i>Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06	<i>Penyuluhan PHBS bagi anak Sekolah</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 20	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02	<i>Pemberian tambahan makanan dan vitamin</i>
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 7	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08	<i>Pertemuan petugas TPG mengenai PWS gizi</i>
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09	<i>Pendistribusian makanan tambahan</i>
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit</b>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01	<i>Penyemprotan/fogging sarang nyamuk</i>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 22 . 03	<i>Pengadaan vaksin penyakit menular</i>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04	<i>Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah</i>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08	<i>Peningkatan imunisasi</i>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09	<i>Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan</i>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 23	<i>Pemberian makanan tambahan bagi penderita TB-Paru</i>

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.02 . 1.02.01 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 25	<i>Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di sekolah</i>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 26	<i>Pemeriksaan golongan darah</i>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 27	<i>Pertemuan pembahasan penyakit degeneratif dan fasilitasi</i>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 22 . 28	<i>Pemeriksaan osteoporosis</i>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 23	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08	<i>Rapat kerja kesehatan daerah</i>
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 24	<b>Program pelayanan kesehatan penduduk miskin</b>
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01	<i>Pelayanan operasi katarak</i>
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 24 . 04	<i>Pelayanan sunatan masal</i>
1.02 . 1.02.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 24 . 12	<i>Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah</i>
1.02 . 1.02.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 24 . 13	<i>Sosialisasi penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 30	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia</b>
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01	<i>Pelayanan pemeliharaan kesehatan</i>

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	66.553.400,00	
	126.912.450,00	
	126.912.450,00	
	29.650.000,00	
	29.650.000,00	
<i>laboratorium puskesmas</i>	44.199.200,00	
	3.600.000,00	
	40.599.200,00	
	20.387.500,00	
	5.600.000,00	
	14.787.500,00	
	34.269.200,00	
	5.961.800,00	
	1.260.000,00	
	4.701.800,00	
	28.307.400,00	
	8.725.000,00	
	19.582.400,00	
	895.656.900,00	
	88.729.000,00	
	16.200.000,00	
	68.663.600,00	
	3.865.400,00	
	35.514.200,00	
	15.900.000,00	
	19.611.200,00	
	761.226.100,00	
	3.248.000,00	
	757.978.100,00	
	10.187.600,00	
	3.600.000,00	
	6.587.600,00	
	49.433.780,00	
	49.433.780,00	



	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	2.150.000,00	
	47.283.780,00	
	94.365.270,00	
	12.527.600,00	
	6.400.000,00	
	6.127.600,00	
	74.380.470,00	
	22.400.000,00	
	40.561.100,00	
	11.419.370,00	
	7.457.200,00	
	7.457.200,00	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(17.594.043.489,00)</b>	



SALAK, 25 Januari 2011

**BUPATI**

*Remigo Yolando Berutu*

**REMIGO YOLANDO BERUTU**

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 32	<b>Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan an</b>
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05	<i>Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)</i>
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 32 . 12	<i>Pelatihan penanganan asfiksia</i>
1.02 . 1.02.01 . 32 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 32 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 32 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 32 . 13	<i>Evaluasi manajemen buku KIA/PWS KIA</i>
1.02 . 1.02.01 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa

**KABUPATEN PAKPAK BHARAT**  
**DAFTAR JURNAL PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,**  
**REKAPITULASI BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2011

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	71.150.000,00	Perda No. 15 Tahun 2007
	71.150.000,00	
	71.150.000,00	
	8.609.013.194,00	
	4.392.818.324,00	
	4.392.818.324,00	
	4.216.194.870,00	
	1.684.320.670,00	
	1.140.000,00	
	1.140.000,00	
	75.125.000,00	
	75.125.000,00	
	98.080.200,00	
	98.080.200,00	
	22.180.400,00	
	22.180.400,00	
	109.739.700,00	
	2.300.000,00	
	107.439.700,00	
	43.215.750,00	
	43.215.750,00	
	44.696.800,00	
	44.696.800,00	
	14.250.000,00	

jumlah kantor



PEMERINTAH  
RINCIAN APBD MENURUT URI  
PENDAPATAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 02                      Urusan Wajib Kesehatan  
Organisasi : 1 . 02 . 02                      RUMAH SAKIT UMUM DAFAH SALAK  
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01                      RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>
1.02 . 1.02.02 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan ban</i>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 .	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 01 . 14	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16	<i>Penyediaan bahan logistik kantor</i>

KODE REKONING	URAIAN
1	2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 01 . 22	<i>Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perka</i>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26	<i>Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah</i>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD</i>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
1.02 . 1.02.02 . 02 . 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>
1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.02 . 1.02.02 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>
1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.02 . 1.02.02 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>
1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>
1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 02 . 30	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor</i>
1.02 . 1.02.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>
1.02 . 1.02.02 . 03 . 05	<i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i>
1.02 . 1.02.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 16	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	14.250.000,00	
	191.995.000,00	
	191.995.000,00	
antoran	788.350.000,00	
	2.300.000,00	
	786.050.000,00	
	293.575.000,00	
	293.575.000,00	
	1.972.820,00	
	1.972.820,00	
	933.787.800,00	
	305.147.700,00	
	2.300.000,00	
	21.600.000,00	
	281.247.700,00	
	299.132.600,00	
	2.300.000,00	
	171.364.000,00	
	125.468.600,00	
	200.000.000,00	
	200.000.000,00	
	120.007.500,00	
	120.007.500,00	
	9.500.000,00	
	9.500.000,00	
	97.370.000,00	
	97.370.000,00	
	1.650.000,00	
	95.720.000,00	
	243.000.000,00	
	243.000.000,00	
	243.000.000,00	
	25.000.000,00	

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	25.000.000,00	
	25.000.000,00	
	191.086.400,00	
	59.821.200,00	
	8.400.000,00	
	51.421.200,00	
	26.705.200,00	
	13.100.700,00	
	13.604.500,00	
	104.560.000,00	
	104.560.000,00	
rumah sakit/ rumah	886.350.000,00	
	886.350.000,00	
	4.850.000,00	
rumah sakit jiwa/	881.500.000,00	
	155.280.000,00	
	133.000.000,00	
	133.000.000,00	
	22.280.000,00	
	20.000.000,00	
	2.280.000,00	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(8.537.863.194,00)</b>	



SALAK, 25 Januari 2011

**BUPATI**

*Remigo Yolando Berutu*

**REMIGO YOLANDO BERUTU**

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.02 . 1.02.02 . 16 . 15	<i>Penyediaan jasa pelayanan kesehatan</i>
1.02 . 1.02.02 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 23	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>
1.02 . 1.02.02 . 23 . 11	<i>Penyusunan standart operating prosedur (SOP) rumah sakit</i>
1.02 . 1.02.02 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.02 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 23 . 12	<i>Peningkatan pelayanan unit transfusi darah rumah sakit</i>
1.02 . 1.02.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.02 . 1.02.02 . 23 . 13	<i>Penyediaan perijinan sarana dan prasarana kesehatan</i>
1.02 . 1.02.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 26	<b>Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata</b>
1.02 . 1.02.02 . 26 . 19	<i>Pengadaan obat-obatan rumah sakit</i>
1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 27	<b>Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata</b>
1.02 . 1.02.02 . 27 . 17	<i>Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit</i>
1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 27 . 22	<i>Kalibrasi alat-alat kesehatan</i>
1.02 . 1.02.02 . 27 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.02 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa



**UPATEN PAKPAK BHARAT**  
**PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,**  
**ANJA DAN PEMBIAYAAN**

ANGGARAN 2011

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	590.000.000,00	Perda No. 16 Tahun 2006 Perbup No. 7 Tahun 2008
	590.000.000,00	
	440.000.000,00	
	150.000.000,00	
	34.467.902.120,00	
	3.061.673.823,00	
	3.061.673.823,00	
	31.406.228.297,00	
	1.039.992.597,00	
	101.445.600,00	
	1.450.000,00	
	99.995.600,00	
	47.306.000,00	
	1.050.000,00	
	46.256.000,00	
	42.999.100,00	
	1.050.000,00	
	11.583.100,00	
	30.366.000,00	
	12.884.000,00	
	1.450.000,00	
	11.434.000,00	
	6.150.000,00	
	1.050.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN  
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN  
PENDAPATAN, BEL  
TAHUN

Urusan Pemerintahan : 1.03      Urusan Wajib Pekerjaan Umum  
Organisasi : 1.03.01      DINAS PEKERJAAN UMUM  
Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01      DINAS PEKERJAAN UMUM

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.03.1.03.01.00.00.4	<b>PENDAPATAN</b>
1.03.1.03.01.00.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.03.1.03.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>
1.03.1.03.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.01.01.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>
1.03.1.03.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
1.03.1.03.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>
1.03.1.03.01.01.01.5.2.1	Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>
1.03.1.03.01.01.02.5.2.1	Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.01.03	<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>
1.03.1.03.01.01.03.5.2.1	Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.01.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.01.03.5.2.3	Belanja Modal
1.03.1.03.01.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ka</i>
1.03.1.03.01.01.12.5.2.1	Belanja Pegawai
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.01.15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>
1.03.1.03.01.01.15.5.2.1	Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22	<i>Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis per</i>
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26	<i>Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah</i>
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD</i>
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Frasarana Aparatur</b>
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03	<i>Pembangunan gedung kantor (DAU)</i>
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparat</b>
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 15	<b>Program pembangunan jalan dan jembatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05	<i>Pembangunan jembatan</i>
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08	<i>Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAU)</i>

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	5.100.000,00	
	65.419.000,00	
	1.450.000,00	
	63.969.000,00	
kantoran	430.400.000,00	
	800.000,00	
	429.600.000,00	
	326.565.000,00	
	1.200.000,00	
	325.365.000,00	
	6.823.897,00	
	800.000,00	
	6.023.897,00	
	7.868.295.800,00	
	7.243.506.600,00	
	20.300.000,00	
	229.306.600,00	
	6.993.900.000,00	
	494.139.200,00	
	6.500.000,00	
	13.639.200,00	
	474.000.000,00	
	130.650.000,00	
	1.050.000,00	
	129.600.000,00	
ur	186.415.000,00	
	186.415.000,00	
	800.000,00	
	185.615.000,00	
	11.785.707.100,00	
	2.624.138.700,00	
	17.300.000,00	
	116.838.700,00	
	2.490.000.000,00	
	2.674.235.700,00	

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	36.550.000,00	
	35.185.700,00	
	2.602.500.000,00	
	6.487.332.700,00	
	51.350.000,00	
	90.302.700,00	
	6.345.680.000,00	
	528.383.000,00	
	528.383.000,00	
	22.050.000,00	
	6.333.000,00	
	500.000.000,00	
	3.099.989.100,00	
	2.656.950.100,00	
	4.250.000,00	
	5.087.500,00	
	2.647.612.600,00	
	443.039.000,00	
	443.039.000,00	
Rawa dan Jaringan	2.547.275.800,00	
	627.499.600,00	
	24.100.000,00	
	21.424.600,00	
	581.975.000,00	
	1.919.776.200,00	
	17.160.000,00	
	69.906.200,00	
	1.832.710.000,00	
buh	974.370.700,00	
	974.370.700,00	
	12.950.000,00	
	11.420.700,00	
	950.000.000,00	
	3.375.799.200,00	

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09	<i>Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK)</i>
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 18	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</b>
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01	<i>Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan</i>
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 23	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan</b>
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04	<i>Pengadaan alat-alat berat</i>
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat</i>
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 24	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Pengairan lainnya</b>
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15	<i>Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun</i>
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18	<i>Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)</i>
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 29	<b>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02	<i>Pembangunan/peningkatan infrastruktur</i>
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 30	<b>Program pembangunan infrastruktur pedesaan</b>

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02	<i>Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan</i>
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03	<i>Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan</i>
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 30 . 11	<i>Pembangunan sarana sanitasi pedesaan (DAK)</i>
1.03 . 1.03.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	1.555.313.400,00	
	13.050.000,00	
	62.262.900,00	
	1.480.000.500,00	
	794.962.900,00	
	12.550.000,00	
	60.152.900,00	
	722.260.000,00	
	1.025.522.900,00	
	12.550.000,00	
	60.152.900,00	
	952.820.000,00	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(33.877.902.120,00)</b>	

SALAK, 25 Januari 2011

**BUPATI**



*Remigo Yolando Berutu*  
**REMIGO YOLANDO BERUTU**



Lampiran III Peraturan Daerah

Nomor : 1 Tahun 2011

Tanggal : 25 Januari 2011

**BUPATEN PAKPAK BHARAT**  
**N PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,**  
**LANJA DAN PEMBIAYAAN**  
 N ANGGARAN 2011

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	500.000,00	
	500.000,00	
	500.000,00	
	5.580.081.798,00	
	2.150.687.198,00	
	2.150.687.198,00	
	3.429.394.600,00	
	732.957.500,00	
	3.000.000,00	
	3.000.000,00	
	53.600.000,00	
	53.600.000,00	
<i>operasional</i>	64.470.000,00	
	64.470.000,00	
	54.570.000,00	
	54.570.000,00	
	32.654.000,00	
	32.654.000,00	
<i>ntor</i>	4.029.300,00	
	4.029.300,00	
	58.399.200,00	
	58.399.200,00	
	7.540.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN  
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
TAHUN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.06      Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan  
Organisasi : 1.06.01      BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01      BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.06.1.06.01.00.00.4	<b>PENDAPATAN</b>
1.06.1.06.01.00.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>
1.06.1.06.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah
1.06.1.06.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>
1.06.1.06.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.01.01.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>
1.06.1.06.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
1.06.1.06.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>
1.06.1.06.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>
1.06.1.06.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/opsional</i>
1.06.1.06.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>
1.06.1.06.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>
1.06.1.06.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>
1.06.1.06.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.01.13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>
1.06.1.06.01.01.13.5.2.3	Belanja Modal
1.06.1.06.01.01.15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22	<i>Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perk</i>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 01 . 26	<i>Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah</i>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26	<i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</i>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 15	<b>Program pengembangan data/informasi</b>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 15	<i>Penyusunan buku statistik Kabupaten Pakpak Bharat</i>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 16	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 06	<i>Koordinasi pelaksanaan dari tugas pembantuan, dekonsen</i>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07	<i>Fasilitasi/Koordinasi program pengembangan kawasan agro</i>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	kota
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	<i>Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan percepatan pembangu</i>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	(PPDT)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	<i>Rencana detail pengembangan kawasan agroforestry</i>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	<i>Rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPD,</i>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	5.580.000,00	
	1.960.000,00	
	47.200.000,00	
	47.200.000,00	
<i>antoran</i>	57.600.000,00	
	57.600.000,00	
	349.895.000,00	
	349.895.000,00	
	107.600.000,00	
	70.000.000,00	
	70.000.000,00	
	37.600.000,00	
	37.600.000,00	
	207.750.000,00	
	207.750.000,00	
	152.430.000,00	
	55.320.000,00	
	468.940.900,00	
<i>trasi</i>	52.657.000,00	
	16.775.000,00	
	35.882.000,00	
<i>politian/forum kabupaten /</i>	68.623.200,00	
	22.010.000,00	
	46.613.200,00	
<i>inan daerah tertinggal</i>	70.225.600,00	
	29.695.000,00	
	40.530.600,00	
	153.062.100,00	
	133.145.000,00	
	19.917.100,00	
4)	124.373.000,00	
	101.975.000,00	
	22.398.000,00	

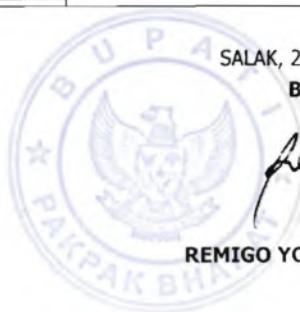
	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
pembangunan	266.235.000,00	
	266.235.000,00	
	266.235.000,00	
	636.766.850,00	
	67.926.500,00	
	31.775.000,00	
	36.151.500,00	
an (LKPI)	59.373.200,00	
	28.555.000,00	
	30.818.200,00	
(PPAS)	57.834.100,00	
	21.290.000,00	
	36.544.100,00	
Anggaran Sementara	57.402.750,00	
	22.505.000,00	
	34.897.750,00	
	207.463.500,00	
	53.225.000,00	
	154.238.500,00	
	46.841.500,00	
	20.166.000,00	
	26.675.500,00	
	95.606.000,00	
	33.075.000,00	
	62.531.000,00	
	44.319.300,00	
	40.995.000,00	
	3.324.300,00	
	424.512.700,00	
aten Pakpak Bharat	123.212.100,00	
	103.195.000,00	
	20.017.100,00	
asyarakat	170.088.500,00	

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.06 . 1.06.01 . 20	<b>Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan daerah</b>
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01	<i>Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana</i>
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 21	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08	<i>Penyusunan rancangan RKPD</i>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12	<i>Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban</i>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14	<i>Penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara</i>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15	<i>Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon (PPAS)</i>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 21 . 20	<i>Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional</i>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 21 . 29	<i>Pelaksanaan musrenbang forum SKPD</i>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 21 . 34	<i>Penetapan dan sosialisasi RPJM Kabupaten Pakpak Bharat</i>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35	<i>Fasilitasi penyusunan RKA SKPD</i>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 22	<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>
1.06 . 1.06.01 . 22 . 19	<i>Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah Kabupa</i>
1.06 . 1.06.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 22 . 20	<i>Identifikasi dampak bantuan pemerintah terhadap pendapatan n</i>

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.06 . 1.06.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 22 . 21	<i>Prospek pengembangan UMKM di Kabupaten Pakpak Bharat</i>
1.06 . 1.06.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 23	<b>Program perencanaan sosial dan budaya</b>
1.06 . 1.06.01 . 23 . 10	<i>Penyusunan strategi pembangunan daerah melalui pendekatan</i>
1.06 . 1.06.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 24	<b>Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya</b>
1.06 . 1.06.01 . 24 . 22	<i>Penyusunan rencana jalan lingkar (ring road) kota Salak</i>
1.06 . 1.06.01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 24 . 23	<i>Fasilitasi dan koordinasi rencana tata ruang tingkat kabupaten</i>
1.06 . 1.06.01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 24 . 24	<i>Sosialisasi PERDA tentang rencana tata ruang wilayah (RTU) Kabupaten</i>
1.06 . 1.06.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	124.762.000,00	
	45.326.500,00	
	131.212.100,00	
	112.195.000,00	
	19.017.100,00	
	135.163.400,00	
<i>katan budaya</i>	136.163.400,00	
	113.425.000,00	
	22.738.400,00	
<b>daya alam</b>	448.468.250,00	
	193.245.000,00	
	179.060.000,00	
	14.185.000,00	
<i>ten, provinsi dan pusat</i>	175.265.250,00	
	89.120.000,00	
	86.145.250,00	
<i>RW) Kabupaten Pakpak</i>	79.958.000,00	
	12.424.000,00	
	31.534.000,00	
	36.000.000,00	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(5.579.581.798,00)</b>	



SALAK, 25 Januari 2011

**BUPATI**

*Remigo Yolando Berutu*

**REMIGO YOLANDO BERUTU**



## Lampiran III Peraturan Daerah

Nomor : 1 Tahun 2011

Tanggal : 25 Januari 2011

**UPATEN PAKPAK BHARAT**  
**PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,**  
**ANJA DAN PEMBIAYAAN**  
 ANGGARAN 2011

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	95.000.000,00	Perda No. 13 Tahun 2008
	95.000.000,00	
	95.000.000,00	
	2.622.530.421,00	
	1.343.772.246,00	
	1.343.772.246,00	
	1.278.758.175,00	
	755.069.950,00	
	47.074.100,00	
	47.074.100,00	
	32.400.000,00	
	32.400.000,00	
	6.694.600,00	
	6.694.600,00	
	45.646.600,00	
	45.646.600,00	
antor	2.391.250,00	
	2.391.250,00	
	104.913.400,00	
	850.000,00	
	321.700,00	
	103.741.700,00	
n	5.240.000,00	



PEMERINTAH KAB  
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN  
PENDAPATAN, BEL  
TAHUN

Urusan Pemerintahan : 1 . 10  
Organisasi : 1 . 10 . 01  
Sub Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 . 01

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

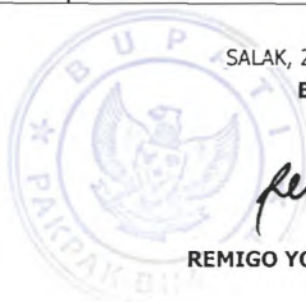
KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>
1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>
1.10 . 1.10.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>
1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>
1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan k.</i>
1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>
1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan jasa
1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanga.</i>

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>
1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 01 . 22	<i>Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perk</i>
1.10 . 1.10.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 01 . 27	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD</i>
1.10 . 1.10.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
1.10 . 1.10.01 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>
1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 02 . 30	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor</i>
1.10 . 1.10.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 02 . 45	<i>Pembuatan sarana dan prasarana gedung kantor</i>
1.10 . 1.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.10 . 1.10.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
1.10 . 1.10.01 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>
1.10 . 1.10.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 05 . 02	<i>Sosialisasi peraturan perundang-undangan</i>
1.10 . 1.10.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 15	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>
1.10 . 1.10.01 . 15 . 14	<i>Pencetakan registrasi KTP, KK, Akta Catatan Sipil dan Kutip</i>
1.10 . 1.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 15 . 16	<i>Pelatihan tenaga petugas register</i>
1.10 . 1.10.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 15 . 19	<i>Pengadaan papan billboard</i>

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	3.240.000,00	
	2.000.000,00	
	24.600.000,00	
	24.600.000,00	
	318.650.000,00	
	318.650.000,00	
antoran	157.200.000,00	
	157.200.000,00	
	10.260.000,00	
	10.260.000,00	
	136.806.925,00	
	16.003.975,00	
	16.003.975,00	
	48.010.000,00	
	48.010.000,00	
	20.500.000,00	
	20.500.000,00	
	52.292.950,00	
	850.000,00	
	48.942.950,00	
	2.500.000,00	
ir	219.480.000,00	
	183.170.000,00	
	183.170.000,00	
	36.310.000,00	
	5.100.000,00	
	31.210.000,00	
	167.401.300,00	
an Akta Catatan Sipil	57.450.000,00	
	450.000,00	
	57.000.000,00	
	10.396.000,00	
	10.396.000,00	
	30.017.000,00	

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	850.000,00	
	2.167.000,00	
	27.000.000,00	
	----- 45.005.900,00	
	----- 45.005.900,00	
	----- 24.532.400,00	
	400.000,00	
	24.132.400,00	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(2.527.530.421,00)</b>	



SALAK, 25 Januari 2011

**BUPATI**

*Remigo Yolando Berutu*

**REMIGO YOLANDO BERUTU**

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.10 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.10 . 1.10.01 . 15 . 22	<i>Pelayanan KTP, KK berjalan</i>
1.10 . 1.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 15 . 23	<i>Sosialisasi akte kelahiran</i>
1.10 . 1.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa

Lampiran III Peraturan Daerah

Nomor : 1 Tahun 2011

Tanggal : 25 Januari 2011

**KABUPATEN PAKPAK BHARAT**  
**PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,**  
**KEPENDIDIKAN DAN PEMBIAYAAN**

ANGGARAN 2011

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	3.227.598.725,00	
	1.687.870.235,00	
	1.687.870.235,00	
	1.539.728.490,00	
	550.273.110,00	
	21.000.000,00	
	21.000.000,00	
	7.645.300,00	
	7.645.300,00	
	42.365.480,00	
	42.365.480,00	
	19.662.120,00	
	19.662.120,00	
	31.724.650,00	
	700.000,00	
	105.000,00	
	30.919.650,00	
	4.600.000,00	
	3.600.000,00	
	1.000.000,00	
	29.792.000,00	
	29.792.000,00	
	32.400.000,00	



PEMERINTAH KAB  
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN  
PENDAPATAN, BEI  
TAHUN

Urusan Pemerintahan : 1 . 13                      Urusan Wajib Sosial  
Organisasi : 1 . 13 . 01                      DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 01 . 01                      DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.13.1.13.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>
1.13.1.13.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.01.02.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>
1.13.1.13.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
1.13.1.13.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>
1.13.1.13.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>
1.13.1.13.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>
1.13.1.13.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>
1.13.1.13.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.01.13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>
1.13.1.13.01.01.13.5.2.1	Belanja Pegawai
1.13.1.13.01.01.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.01.13.5.2.3	Belanja Modal
1.13.1.13.01.01.15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>
1.13.1.13.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.01.15.5.2.3	Belanja Modal
1.13.1.13.01.01.17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>
1.13.1.13.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.13.1.13.01.01.22	<i>Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkar</i>

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN



KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.13 . 1.13.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 01 . 26	<i>Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah</i>
1.13 . 1.13.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 01 . 27	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD</i>
1.13 . 1.13.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
1.13 . 1.13.01 . 02 . 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>
1.13 . 1.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.13 . 1.13.01 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>
1.13 . 1.13.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 02 . 30	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor</i>
1.13 . 1.13.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
1.13 . 1.13.01 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>
1.13 . 1.13.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
2.08 . 1.13.01 . 15	<b>Program pengembangan wilayah transmigrasi</b>
2.08 . 1.13.01 . 15 . 09	<i>Penyusunan profil dan data masyarakat transmigrasi di kawasan SP2 dan SP3 Sibagindar</i>
2.08 . 1.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
2.08 . 1.13.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.13.01 . 15	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>
1.14 . 1.13.01 . 15 . 01	<i>Penyusunan data base tenaga kerja daerah</i>
1.14 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.14 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 16	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16	<i>Pelayanan dan pemberian alat bantu kursi roda untuk penyandang cacat</i>
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	32.400.000,00	
	345.305.000,00	
	345.305.000,00	
	15.778.560,00	
	8.080.000,00	
	7.698.560,00	
	100.147.580,00	
	26.201.580,00	
	800.000,00	
	401.580,00	
	25.000.000,00	
	21.046.000,00	
	700.000,00	
	240.000,00	
	20.106.000,00	
	45.900.000,00	
	45.900.000,00	
	7.000.000,00	
	7.000.000,00	
	155.890.000,00	
	155.890.000,00	
	155.890.000,00	
	48.555.600,00	
<i>... rasan transmigrasi UPT SP1,</i>	48.555.600,00	
	1.600.000,00	
	46.955.600,00	
<i>... rga Kerja</i>	47.834.600,00	
	47.834.600,00	
	8.800.000,00	
	39.034.600,00	
<i>... osial</i>	280.707.100,00	
<i>... vandang cacat</i>	34.200.000,00	
	850.000,00	

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	33.350.000,00	
<i>huni</i>	175.307.100,00	
	1.750.000,00	
	173.557.100,00	
<i>us sekolah</i>	49.200.000,00	
	4.210.000,00	
	44.990.000,00	
	22.000.000,00	
	11.600.000,00	
	10.400.000,00	
	117.046.700,00	
<i>ansmigrasi UPT</i>	117.046.700,00	
	2.320.000,00	
	114.726.700,00	
	41.100.000,00	
<i>ial</i>	41.100.000,00	
	1.270.000,00	
	39.830.000,00	
<i>al</i>	198.173.800,00	
	39.200.000,00	
	850.000,00	
	38.350.000,00	
	99.747.200,00	
	99.747.200,00	
	42.426.600,00	
	9.120.000,00	
	33.306.600,00	
	8.000.000,00	
	400.000,00	
	7.600.000,00	
	8.800.000,00	
	400.000,00	
	8.400.000,00	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(3.227.598.725,00)</b>	

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 16 . 17	<i>Pengadaan sarana dan prasarana pendukung rumah tidak layak</i>
1.13 . 1.13.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18	<i>Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi remaja put</i>
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 16 . 19	<i>Penyuluhan tentang NAPZA terhadap anak remaja</i>
1.13 . 1.13.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
2.08 . 1.13.01 . 16	<b>Program transmigrasi lokal</b>
2.08 . 1.13.01 . 16 . 05	<i>Pembinaan kelompok-kelompok usaha peternakan di kawasan tr</i> <i>Sibagindar</i>
2.08 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
2.08 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 19	<b>Program pembinaan panti asuhan /panti jompo</b>
1.13 . 1.13.01 . 19 . 07	<i>Pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi lansia potens</i>
1.13 . 1.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 21	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosi</b>
1.13 . 1.13.01 . 21 . 10	<i>Peringatan Hari Pahlawan</i>
1.13 . 1.13.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 21 . 13	<i>Operasional taruna siaga bencana dan TKSK</i>
1.13 . 1.13.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 21 . 14	<i>Monitoring dan evaluasi kelompok usaha bersama (KUBE)</i>
1.13 . 1.13.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 21 . 15	<i>Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional</i>
1.13 . 1.13.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 21 . 16	<i>Peringatan Hari Lansia</i>
1.13 . 1.13.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa

RIINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKFNING	URAIAN
1	2

RINCIAN APBD MENURUT URUSAH PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4



SALAK, 25 Januari 2011

BUPATI

REMIGO YOLANDO BERUTU

## Lampiran III Peraturan Daerah

Nomor : 1 Tahun 2011

Tanggal : 25 Januari 2011

**UPATEN PAKPAK BHARAT**  
**PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,**  
**ANJA DAN PEMBIAYAAN**  
 ANGGARAN 2011

DDAL  
 DDAL

	JUMLAH:	DASAR HUKUM
	3	4
	58.462.500,00	
	58.462.500,00	
	58.462.500,00	Perda No. 17 Tahun 2006 Perda No. 8 Tahun 2009 Perda No. 14 Tahun 2006 Perda No. 12 Tahun 2006 Perda No. 20 Tahun 2007 Perda No. 19 Tahun 2007
	1.574.639.607,00	
	872.077.907,00	
	872.077.907,00	
	702.561.700,00	
	402.684.100,00	
	23.392.000,00	
	23.392.000,00	
	25.905.300,00	
	25.905.300,00	
	66.202.200,00	
	66.202.200,00	
	2.283.600,00	
	2.283.600,00	
	8.793.000,00	
	8.793.000,00	
	5.580.000,00	



**PEMERINTAH KAB  
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN  
PENDAPATAN, BEL  
TAHUN**

<b>Urusan Pemerintahan</b> : 1 . 16	Urusan Wajib Penanaman Modal
<b>Organisasi</b> : 1 . 16 . 01	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MC
<b>Sub Unit Organisasi</b> : 1 . 16 . 01 . 01	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MC

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>
1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>
1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah
1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>
1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>
1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>
1.16 . 1.16.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
1.16 . 1.16.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>
1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>
1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>
1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ka</i>
1.16 . 1.16.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 01 . 14	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>
1.16 . 1.16.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang</i>

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN



KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.16 . 1.16.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.16 . 1.16.01 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>
1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>
1.16 . 1.16.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 01 . 22	<i>Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perk</i>
1.16 . 1.16.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 01 . 27	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD</i>
1.16 . 1.16.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
1.16 . 1.16.01 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>
1.16 . 1.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.16 . 1.16.01 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>
1.16 . 1.16.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 02 . 28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>
1.16 . 1.16.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.16 . 1.16.01 . 02 . 30	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor</i>
1.16 . 1.16.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
1.16 . 1.16.01 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>
1.16 . 1.16.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 16	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi In</b>
1.16 . 1.16.01 . 16 . 19	<i>Pembuatan dan revisi PERDA perizinan</i>
1.16 . 1.16.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.16 . 1.16.01 . 16 . 20	<i>Sosialisasi pelayanan kegiatan perizinan</i>
1.16 . 1.16.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.16 . 1.16.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	4.680.000,00	
	900.000,00	
	10.048.000,00	
	10.048.000,00	
	203.850.000,00	
	203.850.000,00	
antaran	32.400.000,00	
	32.400.000,00	
	24.230.000,00	
	24.230.000,00	
	133.036.500,00	
	33.000.000,00	
	33.000.000,00	
	51.020.000,00	
	51.020.000,00	
	44.766.500,00	
	44.766.500,00	
	4.250.000,00	
	4.250.000,00	
ir	115.070.000,00	
	115.070.000,00	
	115.070.000,00	
investasi	51.771.100,00	
	8.827.800,00	
	3.115.000,00	
	5.712.800,00	
	42.943.300,00	
	1.950.000,00	
	40.993.300,00	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(1.516.177.107,00)</b>	

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	850.000,00	
	2.167.000,00	
	27.000.000,00	
	----- 45.005.900,00	
	----- 45.005.900,00	
	----- 24.532.400,00	
	400.000,00	
	24.132.400,00	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(2.527.530.421,00)	



SALAK, 25 Januari 2011

**BUPATI**

*Remigo Yolando Berutu*

**REMIGO YOLANDO BERUTU**

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.10 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.10 . 1.10.01 . 15 . 22	<i>Pelayanan KTP, KK berjalan</i>
1.10 . 1.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 15 . 23	<i>Sosialisasi akte kelahiran</i>
1.10 . 1.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4



SALAK, 25 Januari 2011

**BUPATI**

**REMIGO YOLANDO BERUTU**

KODE REKENING	URAIAN
1	2

## Lampiran III Peraturan Daerah

Nomor : 1 Tahun 2011

Tanggal : 25 Januari 2011

**UPATEN PAKPAK BHARAT**  
**PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,**  
**ANJA DAN PEMBIAYAAN**  
 ANGGARAN 2011

DAN KEBERSIHAN  
 DAN KEBERSIHAN

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	56.336.000,00	Perda No. 18 Tahun 2007 Perda No. 16 Tahun 2006
	56.336.000,00	
	56.336.000,00	
	5.118.990.704,00	
	1.760.770.133,00	
	1.760.770.133,00	
	3.358.220.571,00	
	1.090.994.200,00	
	1.350.000,00	
	1.350.000,00	
	29.100.000,00	
	29.100.000,00	
<i>perasional</i>	220.340.000,00	
	220.340.000,00	
	3.305.800,00	
	3.305.800,00	
	8.500.000,00	
	8.500.000,00	
	35.221.600,00	
	35.221.600,00	
	27.160.200,00	
	27.160.200,00	
<i>antor</i>	2.444.100,00	



PEMERINTAH KAB  
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN  
PENDAPATAN, BELANJA  
TAHUN 2012

Urusan Pemerintahan : 1 . 17                      Urusan Wajib Kebudayaan  
Organisasi : 1 . 17 . 01                      DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN  
Sub Unit Organisasi : 1 . 17 . 01 . 01                      DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>
1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>
1.17 . 1.17.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/c</i>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan k</i>



KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang</i>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Selanjutnya Modal
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 01 . 22	<i>Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perk</i>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 01 . 26	<i>Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah</i>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 01 . 27	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD</i>
1.17 . 1.17.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
1.17 . 1.17.01 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>
1.17 . 1.17.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 02 . 33	<i>Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halan</i>
1.17 . 1.17.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.17 . 1.17.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
1.17 . 1.17.01 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>
1.17 . 1.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.17.01 . 15	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhub</b>
1.07 . 1.17.01 . 15 . 12	<i>Pembangunan sarana dan prasarana dan fasilitas perhubur</i>
1.07 . 1.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.07 . 1.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.17.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.08 . 1.17.01 . 15	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampaha</b>
1.08 . 1.17.01 . 15 . 04	<i>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sara</i>
1.08 . 1.17.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.08 . 1.17.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.17.01 . 15 . 07	<i>Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampaha</i>

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	2.444.100,00	
	25.963.000,00	
	25.963.000,00	
gan	15.060.000,00	
	9.360.000,00	
	5.700.000,00	
	30.468.000,00	
	30.468.000,00	
antoran	334.800.000,00	
	334.800.000,00	
	348.720.000,00	
	348.720.000,00	
	8.561.500,00	
	8.561.500,00	
	55.471.810,00	
	5.184.250,00	
	5.184.250,00	
an kantor	50.287.560,00	
	1.250.000,00	
	3.110.170,00	
	45.927.390,00	
ir	207.437.500,00	
	207.437.500,00	
	207.437.500,00	
ubungan	196.198.631,00	
ngan	196.198.631,00	
	2.975.000,00	
	8.973.600,00	
	184.250.031,00	
pahan	72.235.250,00	
na persampahan	50.375.550,00	
	1.700.000,00	
	48.675.550,00	
7	21.859.700,00	

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	21.859.700,00	
	66.305.900,00	
	66.305.900,00	
	13.850.000,00	
	52.455.900,00	
	56.749.020,00	
	56.749.020,00	
	11.700.000,00	
	45.049.020,00	
	237.857.100,00	
	128.350.600,00	
	1.850.000,00	
	6.500.600,00	
	120.000.000,00	
	34.531.900,00	
	1.900.000,00	
	4.631.900,00	
	28.000.000,00	
	74.974.600,00	
	74.974.600,00	
	163.930.170,00	
	163.930.170,00	
	3.575.000,00	
	23.355.170,00	
	137.000.000,00	
	1.039.636.200,00	
	898.498.100,00	
	71.925.000,00	
	776.573.100,00	
	50.000.000,00	
	100.157.400,00	
	5.075.000,00	
	95.082.400,00	
	40.980.700,00	

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.08 . 1.17.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 15	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>
1.17 . 1.17.01 . 15 . 01	<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah</i>
1.17 . 1.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 1.17.01 . 15	<b>Program pengembangan pemasaran pariwisata</b>
2.04 . 1.17.01 . 15 . 05	<i>Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar</i>
2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 16	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>
1.17 . 1.17.01 . 16 . 05	<i>Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah</i>
1.17 . 1.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	<i>dan peninggalan bawah air</i>
1.17 . 1.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 16 . 12	Belanja Modal
1.17 . 1.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	<i>Pengelolaan karya cetak dan karya rekam</i>
1.17 . 1.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 16 . 15	Belanja Modal
1.17 . 1.17.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	<i>Pendukung promosi budaya pakpak</i>
2.04 . 1.17.01 . 16	Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 1.17.01 . 16 . 06	<b>Program pengembangan destinasi pariwisata</b>
2.04 . 1.17.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	<i>Pengembangan daerah tujuan wisata</i>
2.04 . 1.17.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Pegawai
2.04 . 1.17.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 17	Belanja Modal
1.17 . 1.17.01 . 17 . 04	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>
1.17 . 1.17.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	<i>Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah</i>
1.17 . 1.17.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05	Belanja Modal
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	<i>Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah</i>
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 17 . 06	Belanja Barang dan Jasa
	<i>Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal</i>

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.17 . 1.17.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.17.01 . 21	<b>Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi</b>
1.07 . 1.17.01 . 21 . 05	<i>Pengamanan Idul Fitri dan Tahun Baru</i>
1.07 . 1.17.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.17.01 . 21 . 06	<i>Sosialisasi nama jalan</i>
1.07 . 1.17.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.07 . 1.17.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.17.01 . 24	<b>Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b>
1.08 . 1.17.01 . 24 . 05	<i>Penataan RTH</i>
1.08 . 1.17.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.08 . 1.17.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.17.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.08 . 1.17.01 . 24 . 07	<i>Pengembangan taman rekreasi</i>
1.08 . 1.17.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.08 . 1.17.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.17.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	9.600.000,00	
	31.380.700,00	
	85.337.600,00	
	40.606.800,00	
	40.606.800,00	
	44.730.800,00	
	15.275.000,00	
	29.455.800,00	
	86.067.190,00	
	61.714.520,00	
	1.700.000,00	
	3.514.520,00	
	56.500.000,00	
	24.352.670,00	
	1.250.000,00	
	3.102.670,00	
	20.000.000,00	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(5.062.654.704,00)</b>	

SALAK, 25 Januari 2011

**BUPATI**



*[Handwritten Signature]*

**REMIGO YOLANDO BERUTU**

## Lampiran III Peraturan Daerah

Nomor : 1 Tahun 2011

Tanggal : 25 Januari 2011

**BUPATEN PAKPAK BHARAT**  
**PERATURAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,**  
**PELAYANAN DAN PEMBIAYAAN**  
**DAERAH ANGGARAN 2011**

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	1.588.656.022,00	
	966.021.458,00	
	966.021.458,00	
	622.634.564,00	
	321.652.680,00	
	24.202.880,00	
	400.000,00	
	23.802.880,00	
	14.100.000,00	
	14.100.000,00	
	47.699.100,00	
	850.000,00	
	4.000.000,00	
	42.849.100,00	
	2.948.000,00	
	2.948.000,00	
	6.104.000,00	
	6.104.000,00	
	2.091.000,00	
	2.091.000,00	
	2.420.000,00	
	1.920.000,00	
	500.000,00	
	14.640.000,00	



**PEMERINTAH KAWILAJARAN  
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN  
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

Urusan Pemerintahan	: 1 . 19	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
Organisasi	: 1 . 19 . 01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
Sub Unit Organisasi	: 1 . 19 . 01 . 01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>
1.19 . 1.19.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 03	<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>
1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ka</i>
1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN



KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>
1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 22	<i>Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis per</i>
1.19 . 1.19.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 27	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD</i>
1.19 . 1.19.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
1.19 . 1.19.01 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>
1.19 . 1.19.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
1.19 . 1.19.01 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>
1.19 . 1.19.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 22	<b>Program pencegahan dini dan penanggulangan korban</b>
1.19 . 1.19.01 . 22 . 06	<i>Pelatihan penanggulangan bencana</i>
1.19 . 1.19.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 22 . 07	<i>Pengadaan peralatan kebutuhan penanggulangan bencana</i>
1.19 . 1.19.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	14.640.000,00	
	170.350.000,00	
	170.350.000,00	
kantoran	32.400.000,00	
	32.400.000,00	
	4.697.700,00	
	700.000,00	
	3.997.700,00	
	95.530.000,00	
	51.700.000,00	
	1.700.000,00	
	50.000.000,00	
	43.830.000,00	
	43.830.000,00	
ur	26.075.000,00	
	26.075.000,00	
	26.075.000,00	
n bencana alam	179.376.884,00	
	68.454.600,00	
	13.900.000,00	
	54.554.600,00	
	110.922.284,00	
	400.000,00	
	310.720,00	
	110.211.564,00	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(1.588.656.022,00)</b>	

SALAK, 25 Januari 2011

**BUPATI**



**REMIGO YOLANDO BERUTU**

## Lampiran III Peraturan Daerah

Nomor : 1 Tahun 2011

Tanggal : 25 Januari 2011

**BUPATEN PAKPAK BHARAT**  
**DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,**  
**PELAYANAN DAN PEMBIAYAAN**  
**DAERAH ANGGARAN 2011**

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	2.227.205.638,00	
	1.164.697.638,00	
	1.164.697.638,00	
	1.062.508.000,00	
	317.340.800,00	
	8.700.000,00	
	8.700.000,00	
<i>operasional</i>	49.260.000,00	
	49.260.000,00	
	7.250.000,00	
	7.250.000,00	
	22.248.900,00	
	22.248.900,00	
	11.120.000,00	
	11.120.000,00	
	27.467.200,00	
	1.600.000,00	
	6.777.200,00	
	19.090.000,00	
	3.420.000,00	
	3.420.000,00	
	26.928.000,00	
	26.928.000,00	
<i>kegiatan</i>	37.461.100,00	



PEMERINTAH KABUPATEN  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN  
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
TAHU

Urusan Pemerintahan : 1 . 19                      Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri  
Organisasi : 1 . 19 . 02                      SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 02 . 01                      SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>
1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>
1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>
1.19 . 1.19.02 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.02 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ort</i>
1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.02 . 01 . 09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>
1.19 . 1.19.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.02 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>
1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.02 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>
1.19 . 1.19.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.02 . 01 . 22	<i>Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkant.</i>

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.19 . 1.19.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.02 . 01 . 26	<i>Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah</i>
1.19 . 1.19.02 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.02 . 01 . 27	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD</i>
1.19 . 1.19.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.02 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.02 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>
1.19 . 1.19.02 . 03 . 02	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>
1.19 . 1.19.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.02 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
1.19 . 1.19.02 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>
1.19 . 1.19.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.02 . 05 . 06	<i>Pelatihan SDM</i>
1.19 . 1.19.02 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.02 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.02 . 15	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01	<i>Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan</i>
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.02 . 16	<b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan</b>
1.19 . 1.19.02 . 16 . 07	<i>PAM Hari Besar</i>
1.19 . 1.19.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.02 . 16 . 12	<i>PAM kedatangan pejabat</i>
1.19 . 1.19.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.02 . 16 . 13	<i>Patroli pengawasan dan pengendalian PERDA</i>
1.19 . 1.19.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.02 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	400.000,00	
	37.061.100,00	
	118.070.000,00	
	118.070.000,00	
	5.415.600,00	
	400.000,00	
	5.015.600,00	
	23.931.200,00	
	23.931.200,00	
	850.000,00	
	23.081.200,00	
	103.270.900,00	
	78.290.000,00	
	78.290.000,00	
	24.980.900,00	
	9.700.000,00	
	15.280.900,00	
ungkungan	566.172.800,00	
lingkungan	566.172.800,00	
	5.200.000,00	
	560.972.800,00	
n tindak kriminal	51.792.300,00	
	13.619.500,00	
	400.000,00	
	13.219.500,00	
	16.200.000,00	
	400.000,00	
	15.800.000,00	
	21.972.800,00	
	1.600.000,00	
	20.372.800,00	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(2.227.205.638,00)</b>	

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4



SALAK, 25 Januari 2011

**BUPATI**

**REMIGO YOLANDO BERUTU**

KODE REKENING	URAIAN
1	2

--	--



Lampiran III Peraturan Daerah

Nomor : 1 Tahun 2011

Tanggal : 25 Januari 2011

**KEPADA BUNDA RAJA  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,  
SERTA DAN PEMBIAYAAN**

ANGGARAN 2011

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	2.496.859.144,00	
	2.496.859.144,00	
	2.496.859.144,00	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(2.496.859.144,00)	

SALAK, 25 Januari 2011

**BUPATI**



*Remigo Yolando Berutu*

**REMIGO YOLANDO BERUTU**



PEMERINTAH KAB  
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN  
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN 2010

Urusan Pemerintahan : 1 . 20                      Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Kelembagaan  
Organisasi : 1 . 20 . 01                      DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 01 . 01                      DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>
1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai



PEMERINTAH K  
RINCIAN APBD MENURUT URUS  
PENDAPATAN, I  
TA

Urusan Pemerintahan : 1 . 20      Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administra  
Organisasi : 1 . 20 . 02      KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 02 . 01      KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>
1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai

Lampiran III Peraturan Daerah

Nomor : 1 Tahun 2011

Tanggal : 25 Januari 2011

**CABUPATEN PAKPAK BHARAT  
AN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,  
BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

BUN ANGGARAN 2011

isi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	287.467.506,00	
	287.467.506,00	
	287.467.506,00	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(287.467.506,00)</b>	

SALAK, 25 Januari 2011

**BUPATI**



*Remigo Yolando Berutu*

**REMIGO YOLANDO BERUTU**

Lampiran III Peraturan Daerah

Nomor : 1 Tahun 2011

Tanggal : 25 Januari 2011

**BUPATEN PAKPAK BHARAT  
N PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,  
LANJA DAN PEMBIAYAAN**

N ANGGARAN 2011

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	348.230.000,00	Perda No. 16 Tahun 2006
	348.230.000,00	
	348.230.000,00	
	34.974.067.273,00	
	7.016.057.106,00	
	7.016.057.106,00	
	27.958.010.167,00	
	10.551.993.300,00	
	32.000.000,00	
	32.000.000,00	
	1.863.200.000,00	
	1.863.200.000,00	
	232.544.400,00	
	232.544.400,00	
	204.906.600,00	
	4.350.000,00	
	200.556.600,00	
	191.614.800,00	
	4.350.000,00	
	187.264.800,00	
	1.361.988.500,00	
	4.750.000,00	
	583.236.000,00	
	774.002.500,00	



**PEMERINTAH KA  
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN  
PENDAPATAN, BE  
TAHU**

**Urusan Pemerintahan** : 1 . 20                      Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi K  
**Organisasi** : 1 . 20 . 03                      SEKRETARIAT DAERAH  
**Sub Unit Organisasi** : 1 . 20 . 03 . 01                      SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>
1.20 . 1.20.03 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22	<i>Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis pemerintahan</i>
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26	<i>Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah</i>
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08	<i>Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas</i>
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 02 . 14	<i>Pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah</i>
1.20 . 1.20.03 . 02 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 02 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21	<i>Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas</i>
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
<i>gan</i>	34.445.000,00	
	800.000,00	
	5.895.000,00	
	27.750.000,00	
	2.110.328.000,00	
	2.110.328.000,00	
<i>kantoran</i>	1.157.400.000,00	
	638.400.000,00	
	519.000.000,00	
	3.363.566.000,00	
	3.363.566.000,00	
	7.854.609.800,00	
	4.948.770.000,00	
	4.550.000,00	
	20.220.000,00	
	4.924.000.000,00	
	209.470.000,00	
	4.350.000,00	
	1.620.000,00	
	203.500.000,00	
	228.456.000,00	
	2.950.000,00	
	3.000.000,00	
	222.506.000,00	
	453.603.800,00	
	168.850.000,00	
	249.911.400,00	
	34.842.400,00	
	235.200.000,00	
	235.200.000,00	
	165.000.000,00	
	165.000.000,00	
	1.512.350.000,00	
	1.512.350.000,00	
	101.760.000,00	



	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	101.760.000,00	
	258.470.000,00	
	258.470.000,00	
	4.750.000,00	
	253.720.000,00	
	1.555.203.000,00	
	1.448.640.000,00	
	1.448.640.000,00	
	47.058.000,00	
	12.825.000,00	
	34.233.000,00	
	59.505.000,00	
	4.075.000,00	
	55.430.000,00	
paian kinerja dan	655.927.800,00	
SKPD	65.694.800,00	
	23.820.000,00	
	41.874.800,00	
	36.105.200,00	
	6.070.000,00	
	30.035.200,00	
	25.777.600,00	
	12.140.000,00	
	13.637.600,00	
nan	432.962.500,00	
	77.900.000,00	
	355.062.500,00	
	66.803.100,00	
	21.100.000,00	
	45.703.100,00	
	28.584.600,00	
	10.895.000,00	
	17.689.600,00	
a	23.086.500,00	

KODE REKONING	URAIAN
1	2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 05 . 22	<i>Bimtek implementasi peraturan bupati tentang tata naskah dinas</i>
1.20 . 1.20.03 . 05 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 05 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 05 . 23	<i>Sosialisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah</i>
1.20 . 1.20.03 . 05 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 05 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan keuangan</b>
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja</i>
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02	<i>Penyusunan pelaporan keuangan semesteran</i>
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04	<i>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05	<i>Penyusunan pelaporan evaluasi administrasi kegiatan pembangunan</i>
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 06 . 06	<i>Monitoring dan evaluasi harga sembako</i>
1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 06 . 09	<i>Penyusunan penetapan kinerja (TAPKIN)</i>
1.20 . 1.20.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.20.03 . 15	<b>Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda</b>

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.18 . 1.20.03 . 15 . 08	<i>Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepeduda</i>
1.18 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.18 . 1.20.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.20.03 . 15	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Me</b>
1.25 . 1.20.03 . 15 . 02	<i>Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Inf</i>
1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 15	<b>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan ra</b>
1.20 . 1.20.03 . 15 . 01	<i>Pembahasan rancangan peraturan daerah</i>
1.20 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.24 . 1.20.03 . 15	<b>Program perbaikan sistem administrasi kearsipan</b>
1.24 . 1.20.03 . 15 . 02	<i>Pengumpulan data</i>
1.24 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.24 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.24 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.24 . 1.20.03 . 15 . 03	<i>Pengklasifikasian data</i>
1.24 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.24 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.20.03 . 16	<b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegaha</b>
1.19 . 1.20.03 . 16 . 10	<i>Deteksi dini dan analisa konflik yang terjadi di Masyarakat</i>
1.19 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.19 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.03 . 16	<b>Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaa</b>
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01	<i>Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan peman.</i>
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.09 . 1.20.03 . 16 . 03	<i>Sertifikasi tanah milik daerah</i>
1.09 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 16	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala da</b>
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01	<i>Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan dan kemasyarakatan</i>

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
ian	23.086.500,00	
	1.625.000,00	
	21.461.500,00	
dia Massa	1.201.289.000,00	
ormasi	1.201.289.000,00	
	52.425.000,00	
	1.016.764.000,00	
	132.100.000,00	
kyat daerah	240.004.300,00	
	240.004.300,00	
	62.600.000,00	
	177.404.300,00	
	44.235.600,00	
	21.100.000,00	
	9.320.000,00	
	1.180.000,00	
	10.600.000,00	
	23.135.600,00	
	9.440.000,00	
	13.695.600,00	
1 tindak kriminal	52.808.800,00	
	52.808.800,00	
	31.700.000,00	
	21.108.800,00	
an dan pemanfaatan tanah	2.465.543.275,00	
faatan tanah	2.293.537.100,00	
	34.100.000,00	
	9.437.100,00	
	2.250.000.000,00	
	172.006.175,00	
	21.975.000,00	
	150.031.175,00	
erah/wakil kepala daerah	516.547.200,00	
1/anggota organisasi sosial	71.401.400,00	